

PILKADA LANGSUNG DAN STABILITAS PEMERINTAHAN DI JAWA TENGAH

Oleh : Nunik Retno Herawati

Abstract : Divided government in the District is very interesting to study, in addition to a new phenomenon, the government was divided (split) basically could create instability in governance. Divided government was originally based on the assumption that the direct election results are not always consistent and in line with the results of legislative elections. In this sense the winner of the election is not automatic Direct was the winning party legislative elections because of voter behavior in local elections tend to be more forward Jump candidates (figure) rather than political party choice.

The purpose of this study were : First, analyze the results of the elections Direct elections to the parliament members vote on a number of districts and municipalities in Central Java; Second, look at the dynamics of political relations between the Regional Head Elected to parliament members in a number of districts and municipalities in Central Java of the year 2005 to 2006. For the purpose of this study to analyze by looking at the voting results Election of Members of Parliament and electoral vote resulted directly in a number of districts and municipalities in Central Java. Once it was done in-depth observations on each government Kabupaten/City in Central Java.

The conclusion of this research was the result of election districts / cities in Central Java during the period 2005 - 2006 showed that of the 26 districts / cities which have been carrying out direct elections showed 50% of the area marked with a divided government (divided Government). This showed that the Chief Elected Regional Winners Party was not carried by the legislative elections or a majority of seats in parliament. While 50% of the marked area of government that did not split (unified government), which was carried by the elected Head of the Regional Legislative Election Winners Party (the majority of seats in parliament).

Keyword :



Pendahuluan

Pasca reformasi tahun 1998, banyak perubahan yang mendasar yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diantaranya Pemilu tahun 1999 yang bersifat multi partai. Perubahan signifikan juga terjadi pada Pemilu 2004 yang lalu di mana pemilu tersebut dilakukan secara langsung untuk memilih anggota dewan (DPR/DPRD) dan Presiden/Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung tersebut juga berdampak pada proses Pemilihan Kepala Daerah, seperti yang diamanatkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung (Pilkada Langsung).

Ada beberapa implikasi politik dengan adanya Pilkada langsung di Kabupaten / Kota. Pertama, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Kedua, mengembalikan fungsi DPRD yang bukan lagi sebagai pemberi mandat kepala daerah tetapi lebih sebagai wakil rakyat. Ketiga, memberikan legitimasi yang sama kepada Kepala Daerah dan DPRD. Keempat, membawa kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dengan DPRD. Kelima, mencegah terjadinya politik uang. Keenam, semakin tingginya keterlibatan publik dalam proses politik. Dan ketujuh, agar dapat menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel, aseptabel dan kapabel (Rahman: 2007)

Namun demikian, Pilkada Langsung di Kabupaten / Kota ternyata juga membawa beberapa implikasi yang negative, diantaranya : Pertama, Pilkada langsung bisa memunculkan konflik horizontal maupun vertical di masyarakat; Kedua, biaya Pilkada langsung tidak sedikit sehingga akan menjadi beban APBD Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap belanja public; Ketiga, Jika hasil Pilkada langsung tidak seiring sejalan dengan hasil Pemilu Legislatif maka dikhawatirkan akan terjadi pemerintahan yang Divided (Terbelah). Fenomena ini tentunya akan berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

Asumsi terjadinya pemerintahan Divided di Kabupaten / Kota amat menarik untuk diteliti, selain merupakan fenomena baru, pemerintahan yang divided (terbelah) pada dasarnya dapat menciptakan instabilitas dalam pemerintahan. Pemerintahan Divided tersebut pada mulanya didasarkan asumsi bahwa hasil Pilkada langsung tidak selalu sejalan dan searah dengan hasil pada Pemilu Legislatif. Dalam pengertian ini pemenang pada Pilkada Langsung tidak otomatis merupakan partai pemenang pemilu legislatif karena perilaku pemilih pada Pilkada Langsung cenderung lebih mengedepankan kandidat (figur) daripada pilihan partai Politik.

Penelitian ini tidak mefokuskan pada proses Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkada Langsung) itu sendiri, namun lebih menitikberatkan pada pembuktian asumsi apakah memang benar hasil pilkada langsung bisa menyebabkan pemerintahan yang divided. Untuk tujuan tersebut penelitian ini melakukan analisis dengan melihat hasil perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD dan hasil perolehan suara Pilkada Langsung di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Setelah itu dilakukan pengamatan secara mendalam pada pemerintahan masing-masing Kabupten / Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2005 sampai 2006 sehingga dimungkinkan tidak seluruh Kabupaten/Kota tercover dalam penelitian ini dikarenakan pada tahun 2007 masih ada beberapa Kabupaten / Kota yang akan melaksanakan Pilkada langsung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana hubungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dengan pemilihan Pemilihan Legislatif (DPRD) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah? Apakah telah terjadi fenomena pemerintahan divided di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ?

Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis hasil Pilkada Langsung dengan perolehan suara pemilihan anggota DPRD di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; Kedua, melihat

dinamika hubungan politik antar Kepala Daerah Terpilih dengan anggota DPRD di sejumlah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dari tahun 2005 - 2006.

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi Kepala Daerah terpilih maupun Calon Kepala Daerah untuk memahami proses pemerintahan di daerah. Selain itu juga bisa menjadi masukan bagi anggota DPRD sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah dalam pemerintahan.

Dalam tinjauan politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, DPRD) pada umumnya mewakili rakyat yang disalurkan melalui Partai Politik. Konsep ini dikenal dengan Political Representation. Kehadiran konsep ini dipelopori negara-negara demokrasi yang menganut ideologi politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui mengenai keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. Asumsi ini mendorong lahirnya sistem perwakilan. Ada 2 sistem Perwakilan :

1. Sistem Perwakilan langsung yaitu sistem pemilihan wakil rakyat secara langsung melalui Pemilu oleh rakyat tanpa perantara anggota Dewan.
2. Sistem Perwakilan Tidak Langsung yaitu sistem pemilihan wakil rakyat yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menentukan anggota Dewan.

Dalam ilmu Politik, sistem Pemilihan Umum (Eksekutif dan Legislatif) dikenal 2 sistem pemilihan yaitu :

1. *Sistem Single member Constituency (Sistem Distrik)* dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil. Sistem Distrik biasanya didasarkan atas kesatuan geografis yang dibagi dalam beberapa distrik dan jumlah anggota Dewan ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam sistem ini Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dinyatakan menang, sementara suara lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi bagaimanapun kecil selisih kealahannya. Sehingga sistem ini sebenarnya tidak mengenal sistem perwakilan berimbang.

Sistem distrik mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahan sistem ini adalah :

- a. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas
- b. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam satu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya

Namun demikian, kelebihan sistem ini adalah :

- a. Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh masyarakatnya sehingga hubungan antara pemilih dengan calon akan lebih erat.
- b. Wakil yang terpilih biasanya akan memperjuangkan kepentingan distrik yang telah mendukungnya
- c. Wakil yang terpilih lebih bebas terhadap partainya karena faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor yang lebih penting.
- d. Sistem ini mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya Satu

- e. Sistem ini juga akan menciptakan pemerintahan yang stabil karena meningkatnya kerjasama antar partai politik.
- f. Sistem ini sederhana dan mudah dilaksanakan.

2. *Sistem Multi Member Constituency (Sistem Proporsional).*

Gagasan pokok sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam sistem ini ditentukan suatu perimbangan misal 1 : 400.000, artinya satu wakil merupakan representasi dari 400.000 pemilih. Dalam Sistem ini jumlah anggota Dewan ditentukan atas dasar perimbangan tersebut.

Sistem proporsional memiliki kelemahan antaralain :

- a. Sistem ini mempermudah terjadinya fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru
- b. Wakil yang terpilih lebih terikat kepada partai dan kurang menaruh loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya.
- c. Banyaknya partai dalam sistem ini akan mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil.

Menurut UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD disebutkan bahwa sistem yang akan dipakai dalam Pemilu 2004 adalah " Sistem Proporsional dengan Calon Terbuka". Sistem ini pada dasarnya tetap merupakan sistem proporsional namun memberikan sedikit peluang dan kesempatan kepada pemilih untuk memilih anggota DPRD secara langsung.

Ternyata sistem ini melalui pasal 107 UU No 12 Tahun 2003 menimbulkan banyak masalah dalam praktek di lapangan. Menurut pasal 107 ayat (2), nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. Angka BPP ini ternyata relatif sangat besar sehingga sulit bagi calon untuk mencapainya. Pasal ini juga menjelaskan, jika calon tidak mencapai angka BPP maka penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Di sinilah permasalahannya, yaitu tidak konsistennya pelaksanaan ketentuan UU no 12 tahun 2003. Seharusnya penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak namun dalam pelaksanaannya penetapan calon terpilih berdasar nomor urut sehingga peranan partai politik masih cukup besar dalam menentukan anggota DPRD. Inilah kelemahan pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang lalu.

Menurut Douglas V Verney (Lijphart Arend ; 1995 : 35), ada sejumlah prinsip dasar yang menjadi ciri pemerintahan Parlementer yaitu : Kepala pemerintahan dapat membubarkan parlemen; Pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada parlemen; parlemen memiliki supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah; pemerintah hanya bertanggung jawab secara tidak langsung kepada para pemilih; dan Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Sementara sistem Presidensiil mempunyai beberapa ciri antaralain : Pemerintah dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu; Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi; Eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen; Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para pemilih dan tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Sementara itu Arend Lijphart mencatat ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem presidensiil (Lijphart; 1995)
Kelebihan sistem Presidensiil :

1. Adanya stabilitas eksekutif didasarkan pada masa jabatannya. Dengan demikian Eksekutif tidak akan bisa dijatuhkan legislatif meskipun eksekutif telah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen
2. Pemilihan Kepala Pemerintahan secara langsung oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung

Adapun kelemahan sistem Presidensiil adalah :

1. Bila terjadi kemandegan atau konflik eksekutif - legislatif maka tidak ada sumber daya institusional untuk memecahkannya. Akibatnya adalah terjadinya 'kelumpuhan' pemerintahan.
2. Ada Kekakuan temporal. Dengan masa jabatan yang pasti, maka sangat sulit untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti akan menggambarkan kondisi serta menghimpun dan menganalisis fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data agregat yang dikumpulkan dari KPU Jawa Tengah maupun KPUD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Metode Penelitian

Untuk mengetahui dinamika hubungan antara Kepala Daerah dengan anggota Legislatif maka akan dilihat dulu hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2004. Dalam tabel 1 bisa dilihat bahwa dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih merupakan kekuatan dominan di Jawa Tengah terbukti dengan 24 Kabupaten/Kota dikuasai oleh PDIP. Banyak penjelasan yang bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena tersebut, salah satunya adalah karena sebagai Partainya 'Wong Cilik' PDIP mendapat dukungan yang cukup solid dari masa arus bawah yang kekagumannya terhadap Bung Karno tidak pernah surut. Alasan tersebut juga didukung karena sebagian besar wilayah Jawa Tengah juga bisa dikategorikan sebagai daerah 'Abangan' yang pada umumnya merupakan basis masa PDIP.

Hasil Penelitian

Tabel 1
Perolehan Kursi Legislatif
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2004

NO	PARTAI PEMENANG PEMILU LEGISLATIF 2004	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE
1	PDIP	24	68,6%
2	Partai Golkar	4	11,4%
3	PKB	4	11,4%
4	PPP	2	5,7%
	TOTAL	34	97,1%

Keterangan : Ada 1 (Satu) Kabupaten Perolehan kursi sama antara PDIP dan Golkar yaitu di Kabupaten Banjarnegara

Dari Tabel 1 di atas, secara keseluruhan bisa dikatakan untuk propinsi Jawa Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menguasai mayoritas Kursi DPRD Kabupaten/Kota. Hampir 70% Kabupaten/Kota, kursi DPRD lebih banyak diduduki kader dari PDIP. Sementara Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa menduduki urutan kedua dalam perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. P.Golkar dan PKB hanya memenangi 4 (empat) atau sekitar 11% Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan PPP hanya menguasai kursi DPRD di dua Kabupaten /Kota atau sekitar 5.7%.

Dari Tabel 1 itu juga bisa terlihat bahwa Partai Pemenang Pemilu Legislatif di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih menjadi milik "Partai Politik Lama" yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Dan hanya 1 (satu) Partai Politik baru yang bisa memperoleh kemenangan dalam Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2004 yaitu PKB iyang sebenarnya juga bukan Partai Politik Baru karena PKB sudah pernah ikut menjadi kontestan pada Pemilu Legislatif Tahun 1999.

Fenomena yang menarik lagi dari Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota pada Tahun 2004 adalah perolehan suara yang cenderung tidak ada yang dominan dalam arti perolehan suaranya lebih dari 50%. Banyaknya Partai Politik yang menjadi Peserta (Kontestan) pada Pemilu Legislatif 2004 tampaknya amat sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Partai dalam Pemilu Legislatif tersebut. Tabel 2 berikut ini akan memerinci perolehan suara Partai Pemenang Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota pada tahun 2004.

Tabel 1
Perolehan Kursi Legislatif
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2004

Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase
PDIP	10	70%
PBB	4	11%
PBB	4	11%
PPP	2	5.7%
TOTAL	20	100%

Tabel 2
Perolehan Suara Partai Pemenang Pemilu Legislatif
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2005 - 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	PARTAI PENDUKUNG	PEROLEHAN SUARA		
			SUARA PARTAI	TOTAL	%
KARISEDENAN PEKALONGAN					
1.	Kab. Brebes	PDIP	244.77	876.468	27,93
2.	Kab. Tegal	PKB	197.771	698.141	28,33
3.	Kota Tegal	PDIP	33.752	128.392	26,29
4.	Kab Pemalang (17)	PDIP	170.797	656.826	26,00
5.	Kab. Pekalongan (22)	PKB	135.821	432.147	31,43
6.	Kota Pekalongan (1)	PPP	27.443	147.869	18,56
7.	Kab Batang (25)	PDIP	133.781	387.213	34,55
KARISEDENAN SEMARANG					
8.	Kab. Kendal (4)	PDIP	130.483	494.261	26,40
9.	Kota Semarang (3)	PDIP	207.027	775.710	26,69
10.	Kab. Semarang (12)	PDIP	120.884	511.166	23,65
11.	Kab. Demak (19)	PDIP	167.798	540.284	31,06
12.	Kota Salatiga (21)	P GOLKAR	17.702	90.326	19,60
13.	Kab. Grobogan (18)	PDIP	247.891	687.217	36,07
KARISEDENAN PATI					
14.	Kab. Kudus	PKB	83.946	384.958	21,81
15.	Kab. Jepara (26)	PPP	177.306	556.618	31,85
16.	Kab. Pati (23)	PDIP	214.151	652.950	32,80
17.	Kab. Rembang (5)	P GOLKAR	70.431	333.165	21,14
18.	Kab. Blora (8)	PDIP	149.067	464.537	32,10
KARISEDENAN SURAKARTA					
19.	Kab. Sragen(20)	PDIP	239.429	500.075	47,88
20.	Kab. Klaten (16)	PDIP	263.036	682.229	38,56
21.	Kab. Boyolali (9)	PDIP	139.341	541.890	25,71
22.	Kab. Karanganyar	P GOLKAR	118.395	467.383	25,33
23.	Kab. Sukoharjo (7)	PDIP	172.558	458.958	37,60
24.	Kab. Wonogiri (15)	PDIP	296.081	596.079	49,67
25.	Kota Surakarta (11)	PDIP	103.886	291.396	35,65
KARISEDENAN KEDU					
26.	Kab. Magelang	PKB	182.829	686.300	26,64
27.	Kota Magelang (6)	PDIP	18.367	69.500	26,43
28.	Kab. Temanggung	P GOLKAR	86.000	424.871	20,24
29.	Kab. Purworejo (13)	PDIP	112.271	401.175	27,99
30.	Kab. Kebumen (2)	PDIP	210.753	599.689	35,14
31.	Kab. Wonosobo (14)	PDIP	120.423	430.428	27,98
KARISEDENAN BANYUMAS					
32.	Kab. Banyumas	PDIP	316.003	853.060	37,04
33.	Kab. Cilacap	PDIP	299.106	891.911	33,54
34.	Kab. Purbalingga (10)	PDIP	153.413	451.612	33,97
35.	Kab. Banjarnegara (24)	PDIP dan P GOLKAR	115.171	479.530	24,02

Sumber : KPU Jawa Tengah

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa banyaknya partai Peserta Pemilu Legislatif telah menyebabkan perolehan suara tidak ada yang mencapai mayoritas di DPRD Kabupaten / Kota. Dari Hasil Pemilu Legislatif 2004 hanya 2 (dua) Kabupaten yang hampir bisa mencapai suara mayoritas di DPRD yaitu Kabupaten Wonogiri (PDIP : 49,67%) serta Kabupaten Sragen (PDIP: 47,88%). Secara keseluruhan perolehan suara Partai Pemenang Pemilu Legislatif di Kabupaten/Kota pada tahun 2004 hanya menguasai sekitar 20% - 30%. Hal ini tentunya juga akan sangat mempengaruhi kekuatan politik Partai Pemenang Pemilu Legislatif 2004 di DPRD. Kekuatan politik Partai Pemenang Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota pada tahun 2004 secara detail bisa dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Kekuatan Partai Pemenang Pemilu Legislatif 2004
Di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO	PROSENTASE	KATEGORI KEKUATAN POLITIK	JML KABUPATEN
1	10% - 20%	Sangat Lemah	2
2	20% - 30%	Lemah	17
3	30% - 40%	Sedang	14
4	40% - 50%	Tinggi	2
5	Lebih 50%	Sangat Tinggi	0

Sumber : Data diolah

Dari perolehan suara Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota pada tahun 2004 di atas yang menunjukkan bahwa tidak ada partai politik yang bisa mencapai dominasi pada akhirnya juga ikut mempengaruhi kedudukan kursi anggota DPRD. Kekuatan partai politik di Kursi DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Jumlah Perolehan Kursi DPRD
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	Partai Pemenang Pemilu legislatif	Total Kursi	Kursi Partai Pemenang	Prosentase
	KARISEDENAN PEKALONGAN				
1.	Kab. Brebes	PDIP	45	13	28,89
2.	Kab. Tegal	PKB	45	14	31,11
3.	Kota Tegal	PDIP	30	8	26,67
4.	Kab Pemasang (17)	PDIP	45	11	24,44
5.	Kab. Pekalongan (22)	PKB	45	15	33,33
6.	Kota Pekalongan (1)	PPP	30	7	23,33
7.	Kab Batang (25)	PDIP	45	17	37,78
	KARISEDENAN SEMARANG				
8.	Kab. Kendal (4)	PDIP	45	14	31,11
9.	Kota Semarang (3)	PDIP	45	12	26,67
10.	Kab. Semarang (12)	PDIP	45	12	26,67
11.	Kab. Demak (19)	PDIP	45	16	35,56
12.	Kota Salatiga (21)	P GOLKAR	25	6	24,00
13.	Kab. Grobogan (18)	PDIP	45	17	37,78
	KARISEDENAN PATI				
14.	Kab. Kudus	PKB	45	9	20,00
15.	Kab. Jepara (26)	PPP	45	14	31,11
16.	Kab. Pati (23)	PDIP	45	16	35,56
17.	Kab. Rembang (5)	P GOLKAR	45	12	26,67
18.	Kab. Blora (8)	PDIP	45	15	33,33
	KARISEDENAN SURAKARTA				
19.	Kab. Sragen	PDIP	45	22	48,89
20.	Kab. Klaten (16)	PDIP	45	18	40,00
21.	Kab. Boyolali (9)	PDIP	45	12	26,67
22.	Kab. Karanganyar	P GOLKAR	45	13	28,89
23.	Kab. Sukoharjo (7)	PDIP	45	17	37,78
24.	Kab. Wonogiri (15)	PDIP	45	24	53,33
25.	Kota Surakarta (11)	PDIP	40	15	33,33
	KARISEDENAN KEDU				
26.	Kab. Magelang	PKB	45	12	26,67
27.	Kota Magelang (6)	PDIP	25	7	28,00
28.	Kab. Temanggung	P GOLKAR	45	11	24,44
29.	Kab. Purworejo (13)	PDIP	45	13	28,89
30.	Kab. Kebumen (2)	PDIP	45	19	42,22
31.	Kab. Wonosobo (14)	PDIP	45	14	31,11
	KARISEDENAN BANYUMAS				
32.	Kab. Banyumas	PDIP	45	16	35,56
33.	Kab. Cilacap	PDIP	45	16	35,56
34.	Kab. Purbalingga (10)	PDIP	45	17	37,78
35.	Kab. Banjarnegara (24)	PDIP dan P GOLKAR	45	12	26,67

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4 diatas hanya di Kabupaten Wonogiri kursi DPRD bisa dikuasai mayoritas (Lebih dari 50%) oleh kader PDIP. Sementara Partai Pemenang Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota pada tahun 2004 di sejumlah wilayah hanya menguasai kursi DPRD sekitar 20% - 30% saja. Hal ini tentunya akan bisa mempengaruhi efektifitas kinerja anggota DPRD di Kabupaten/Kota.

Hasil Pemilu Legislatif di atas ternyata tidak seluruhnya menjadikan PDIP menjadi Pemenang untuk Pilkada di Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Untuk melihat perolehan hasil Pilkada langsung di Kabupaten / Kota akan dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Partai Pemenang Pilkada Langsung Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2005 - 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	PARTAI PENDUKUNG	PEROLEHAN SUARA	
			JML	%
KARISEDENAN PEKALONGAN				
1.	Kab. Brebes			
2.	Kab. Tegal			
3.	Kota Tegal			
4.	Kab Pemalang (17)	PPP	245.675	42,60
5.	Kab. Pekalongan (22)	PKB dan P Golkar	226.995	52,22
6.	Kota Pekalongan (1)	P GOLKAR	51.934	43,45
7.	Kab Batang (25)	PDIP	294.770	76,6
KARISEDENAN SEMARANG				
8.	Kab. Kendal (4)	PDIP, GOLKAR, PPP, PNBK, PPD, PPDK, PDS, PNIM, PSI, PELOPOR, DEMOKRAT	188.262	43,22
9.	Kota Semarang (3)	PAN, PKB, PPP		
10.	Kab. Semarang (12)	PKB an PKPI	142.285	35,32
11.	Kab. Demak (19)	PKB dan PKS	245.805	43,95
12.	Kota Salatiga (21)	PDIP dan PAN	31.764	36,38
13.	Kab. Grobogan (18)	P GOLKAR	297.777	44,81
KARISEDENAN PATI				
14.	Kab. Kudus			
15.	Kab. Jepara (26)	PPP, DEMOKRAT, PDS	241.333	56,21
16.	Kab. Pati (23)	PDIP dan DEMOKRAT	195.599	46,44
17.	Kab. Rembang (5)	PKB, PAN PBB, PPD, DEMOKRAT, PELOPOR	158.090	49,14
18.	Kab. Blora (8)	P GOLKAR	232.721	52,66
KARISEDENAN SURAKARTA				
19.	Kab. Sragen(20)	PDIP dan P GOLKAR	395.539	87,34
20.	Kab. Klaten (16)	P GOLKAR	219.057	36,23
21.	Kab. Boyolali (9)	P GOLKAR	213.530	41,75
22.	Kab. Karanganyar			
23.	Kab. Sukoharjo (7)	PDIP	145.923	35,88
24.	Kab. Wonogiri (15)	PDIP dan P GOLKAR	356.607	63,93
25.	Kota Surakarta (11)	PDIP	99.961	38,67
KARISEDENAN KEDU				
26.	Kab. Magelang			
27.	Kota Magelang (6)	PDIP dan PAN	31.918	50,27
28.	Kab. Temanggung			
29.	Kab. Purworejo (13)	P. GOLKAR	147.645	36,87
30.	Kab. Kebumen (2)	PDIP	462.568	77,48
31.	Kab. Wonosobo (14)	PKB dan PKS	221.214	52,04
KARISEDENAN BANYUMAS				
32.	Kab. Banyumas			
33.	Kab. Cilacap			
34.	Kab. Purbalingga (10)	PDIP, PKB, PPP, PKS dan PAN	368.530	84,70
35.	Kab. Banjarnegara (24)	P GOLKAR. PPP dan PBB	207.155	41,88

Sumber : Data KPU, diolah

Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa perolehan suara dalam Pilkada Langsung di 26 Kabupaten/Kota menunjukkan hasil yang berbeda dengan perolehan suara Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota pada tahun 2004. Perbedaan yang mencolok tersebut adalah bahwa rata-

rata perolehan suara Pilkada Langsung sekitar 40% - 50% bahkan ada 3 (dua) Kabupaten yaitu Purbalingga, Kebumen dan Sragen dukungan suara kepada pasangan Bupati/Wakil Bupati mencapai lebih dari 80%. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat legitimasinya dan dukungan rakyat pada eksekutif (Kepala Daerah) lebih baik dibandingkan dukungan pada anggota Dewan.

Untuk melihat hubungan apakah partai yang berhasil menjadi Pemenang pada pemilu Legislatif Kabupaten/Kota Tahun 2004 juga berhasil memenangkan Calon Kepala Daerah bisa dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Hubungan Partai Pemenang Legislatif dan Pemenang Pilkada
Kabupaten / Kota Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	PARTAI PEMENANG PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN/KOTA	PARTAI PENDUKUNG PEMENANG PILKADA
	KARISEDENAN PEKALONGAN		
1.	Kab. Brebes	PDIP	
2.	Kab. Tegal	PKB	
3.	Kota Tegal	PDIP	
4.	Kab Pemalang (17)	PDIP	PPP
5.	Kab. Pekalongan (22)	PKB	PKB dan P Golkar
6.	Kota Pekalongan (1)	PPP	P GOLKAR
7.	Kab Batang (25)	PDIP	PDIP
	KARISEDENAN SEMARANG		
8.	Kab. Kendal (4)	PDIP	PDIP, GOLKAR, PPP, PNBK, PPD, PPK, PDS, PNIM, PSI, PELOPOR, DEMOKRAT
9.	Kota Semarang (3)	PDIP	PAN, PKB, PPP
10.	Kab. Semarang (12)	PDIP	PKB an PKPI
11.	Kab. Demak (19)	PDIP	PKB dan PKS
12.	Kota Salatiga (21)	P GOLKAR	PDIP dan PAN
13.	Kab. Grobogan (18)	PDIP	P GOLKAR
	KARISEDENAN PATI		
14.	Kab. Kudus	PKB	
15.	Kab. Jepara (26)	PPP	PPP, DEMOKRAT, PDS
16.	Kab. Pati (23)	PDIP	PDIP dan DEMOKRAT
17.	Kab. Rembang (5)	P GOLKAR	PKB, PAN PBB, PPD, DEMOKRAT, PELOPOR
18.	Kab. Blora (8)	PDIP	P GOLKAR
	KARISEDENAN SURAKARTA		
19.	Kab. Sragen(20)	PDIP	PDIP Dan P GOLKAR
20.	Kab. Klaten (16)	PDIP	P GOLKAR
21.	Kab. Boyolali (9)	PDIP	P GOLKAR
22.	Kab. Karanganyar	P GOLKAR	
23.	Kab. Sukoharjo (7)	PDIP	PDIP
24.	Kab. Wonogiri (15)	PDIP	PDIP dan P GOLKAR
25.	Kota Surakarta (11)	PDIP	PDIP
	KARISEDENAN KEDU		
26.	Kab. Magelang	PKB	
27.	Kota Magelang (6)	PDIP	PDIP dan PAN
28.	Kab. Temanggung	P GOLKAR	
29.	Kab. Purworejo (13)	PDIP	P. GOLKAR
30.	Kab. Kebumen (2)	PDIP	PDIP
31.	Kab. Wonosobo (14)	PDIP	PKB dan PKS
	KARISEDENAN BANYUMAS		
32.	Kab. Banyumas	PDIP	
33.	Kab. Cilacap	PDIP	
34.	Kab. Purbalingga (10)	PDIP	PDIP, PKB, PPP, PKS dan PAN
35.	Kab. Banjarnegara (24)	PDIP dan P GOLKAR	P GOLKAR, PPP dan PBB

Sumber : Data KPU diolah

Dari pilkada langsung yang telah berlangsung di 26 Kabupaten/Kota Jawa Tengah, sebanyak 13 (50%) wilayah ditandai dengan kemenangan calon yang diusung oleh Pemenang Pemilu

Legislatif. Dalam pengertian ini Pemenang Pemilu Legislatif sekaligus menjadi pemenang dalam Pilkada Langsung yaitu di di Kab Pekalongan, Batang, Kendal, Jepara, Pati, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara.

Sementara sisanya 13 Kabupaten/Kota (50%) wilayah ditandai oleh kekalahan calon yang diusung oleh Pemenang Pemilu Legislatif yaitu Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab Semarang, Demak, Kota salatiga, Kab Grobogan, Rembang, Blora, Klaten, Boyolali, Purworejo, Wonosobo.

Hasil di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ini tidak jauh berbeda dengan Tingkat nasional. Di seluruh Indonesia, LSI pernah melakukan survei tentang hubungan Pemilu Legislatif dengan hasil Pilkada Langsung. Hasilnya ternyata 43,1% wilayah ditandai kemenangan calon yang diusung pemenang Pemilu Legislatif. Sementara sisanya 56,9% wilayah ditandai oleh kekalahan calon yang oleh pemenang Pemilu Legislatif. (Lihat Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia Edisi 03, Juli 2007, Jakarta)

Tabel 7
Kemenangan/Kekalahan
Pemenang Pemilu Legislatif dan Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

N O	KABUPATEN/KOTA	PARTAI PEMENANG PEMILU LEG	PARTAI PENDUKUNG PEMENANG PILKADA	Menang	Kalah
	KARISEDENAN PEKALONGAN				
1.	Kab. Brebes	PDIP			
2.	Kab. Tegal	PKB			
3.	Kota Tegal	PDIP			
4.	Kab Pemalang (17)	PDIP	PPP		Kalah
5.	Kab. Pekalongan (22)	PKB	PKB dan P GOLKAR	Menang	
6.	Kota Pekalongan (1)	PPP	P GOLKAR		Kalah
7.	Kab Batang (25)	PDIP	PDIP	Menang	
	KARISEDENAN SEMARANG				
8.	Kab. Kendal (4)	PDIP	PDIP, GOLKAR, PPP, PNBK, PPD, PPK, PDS, PNM, PSI, PELOPOR, DEMOKRAT	Menang	
9.	Kota Semarang (3)	PDIP	PAN, PKB, PPP		Kalah
10.	Kab. Semarang (12)	PDIP	PKB an PKPI		Kalah
11.	Kab. Demak (19)	PDIP	PKB dan PKS		Kalah
12.	Kota Salatiga (21)	P GOLKAR	PDIP dan PAN		Kalah
13.	Kab. Grobogan (18)	PDIP	P GOLKAR		Kalah
	KARISEDENAN PATI				
14.	Kab. Kudus	PKB			
15.	Kab. Jepara (26)	PPP	PPP, DEMOKRAT, PDS	Menang	
16.	Kab. Pati (23)	PDIP	PDIP dan DEMOKRAT	Menang	
17.	Kab. Rembang (5)	P GOLKAR	PKB, PAN PBB, PPD, DEMOKRAT, PELOPOR		Kalah
18.	Kab. Blora (8)	PDIP	P GOLKAR		Kalah
	KARISEDENAN SURAKARTA				
19.	Kab. Sragen(20)	PDIP	PDIP Dan P GOLKAR	Menang	
20.	Kab. Klaten (16)	PDIP	P GOLKAR		Kalah
21.	Kab. Boyolali (9)	PDIP	P GOLKAR		Kalah
22.	Kab. Karanganyar	P GOLKAR			
23.	Kab. Sukoharjo (7)	PDIP	PDIP	Menang	
24.	Kab. Wonogiri (15)	PDIP	PDIP dan P GOLKAR	Menang	
25.	Kota Surakarta (11)	PDIP	PDIP	Menang	
	KARISEDENAN KEDU				
26.	Kab. Magelang	PKB			
27.	Kota Magelang (6)	PDIP	PDIP dan PAN	Menang	
28.	Kab. Temanggung	P GOLKAR			
29.	Kab. Purworejo (13)	PDIP	P. GOLKAR		Kalah
30.	Kab. Kebumen (2)	PDIP	PDIP	Menang	
31.	Kab. Wonosobo (14)	PDIP	PKB dan PKS		Kalah
	KARISEDENAN BANYUMAS				
32.	Kab. Banyumas	PDIP			
33.	Kab. Cilacap	PDIP			
34.	Kab. Purbalingga (10)	PDIP	PDIP, PKB, PPP, PKS dan PAN	Menang	
35.	Kab. Banjarnegara (24)	PDIP dan P GOLKAR	P GOLKAR, PPP dan PBB	Menang	
				13	13

Gejala kekalahan calon yang diusung partai pemenang Pemilu Legislatif ternyata melanda 3 partai politik baik partai politik. Dari Tabel 8 di bawah terlihat bahwa PDIP mengalami kekalahan di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau sekitar 47,62%. Partai Golkar mengalami kekalahan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kota Salatiga dan Kab Rembang atau sekitar 66,67% dan hanya memenangkan di 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara. Sementara PPP yang hanya 1 (satu) wilayah memenangkan Pemilu Legislatif ternyata tidak bisa memenangkan Pilkada atau mengalami kekalahan di Kota Pekalongan. Hasil yang lumayan diperoleh PKB. Meski hanya memenangi 1 wilayah dalam Pemilu Legislatif, PKB tetap bisa mempertahankan basis suaranya dengan memenangkan suara di Pilkada Kabupaten Pekalongan

Tabel 8
Hubungan Hasil Legislatif dengan Pilkada Langsung
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2004

NO	PARTAI PEMENANG LEGISLATIF 2004	JUMLAH KABUPATEN /KOTA	YANG SUDAH PILKADA	MENANG		KALAH	
				F	%	F	%
1	PDIP	24	21	11	52,38	10	47,62
2	Partai Golkar	4	3	1	33,33	2	66,67
3	PKB	4	1	1	100	-	-
4	PPP	2	1	-	-	1	100
	TOTAL	34	26	13		13	

Keterangan : Ada 1 (Satu) Kabupaten Perolehan kursi sama antara PDIP dan Golkar yaitu di Kabupaten Banjarnegara

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kemenangan Pemilu Legislatif tidak otomatis menjadi jaminan bagi partai politik untuk berhasil mengusung calon Kepala Daerah memenangkan Pilkada Langsung.

Secara teoritis, dominasi kekuatan partai dalam Pemilu Legislatif akan menentukan tingkat kemenangan suatu partai dalam pilkada. Makin tinggi dominasi suatu partai maka makin besar pula peluang suatu partai dalam memenangkan Pilkada langsung. Hal ini karena dominasi partai menunjukkan basis masa yang kuat dan kekuatan dari mesin politik dari partai politik. Partai yang memperoleh suara besar dalam Pemilu Legislatif (dengan perolehan suara misalnya di atas 50%) tentunya akan menggambarkan basis masa yang kuat dari partai itu sekaligus juga memperlihatkan mesin politik yang bekerja secara optimal di suatu wilayah (Lihat Tabel 9).

Tabel 9

Hubungan Dominasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif dengan Kemenangan/Kekalahan dalam Pilkada Langsung Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2005 -2006

NO	KABUPATEN/KOTA	PARTAI PENDUKUNG	SUARA PARTAI	%	HASIL PILKADA
KARISEDENAN PEKALONGAN					
1.	Kab. Brebes	PDIP	244.77	27,93	
2.	Kab. Tegal	PKB	197.771	28,33	
3.	Kota Tegal	PDIP	33.752	26,29	
4.	Kab Pemalang (17)	PDIP	170.797	26,00	Kalah
5.	Kab. Pekalongan (22)	PKB	135.821	31,43	Menang
6.	Kota Pekalongan (1)	PPP	27.443	18,56	Kalah
7.	Kab Batang (25)	PDIP	133.781	34,55	Menang
KARISEDENAN SEMARANG					
8.	Kab. Kendal (4)	PDIP	130.483	26,40	Menang
9.	Kota Semarang (3)	PDIP	207.027	26,69	Kalah
10.	Kab. Semarang (12)	PDIP	120.884	23,65	Kalah
11.	Kab. Demak (19)	PDIP	167.798	31,06	Kalah
12.	Kota Salatiga (21)	P GOLKAR	17.702	19,60	Kalah
13.	Kab. Grobogan (18)	PDIP	247.891	36,07	Kalah
KARISEDENAN PATI					
14.	Kab. Kudus	PKB	83.946	21,81	
15.	Kab. Jepara (26)	PPP	177.306	31,85	Menang
16.	Kab. Pati (23)	PDIP	214.151	32,80	Menang
17.	Kab. Rembang (5)	P GOLKAR	70.431	21,14	Kalah
18.	Kab. Blora (8)	PDIP	149.067	32,10	Kalah
KARISEDENAN SURAKARTA					
19.	Kab. Sragen(20)	PDIP	239.429	47,88	Menang
20.	Kab. Klaten (16)	PDIP	263.036	38,56	Kalah
21.	Kab. Boyolali (9)	PDIP	139.341	25,71	Kalah
22.	Kab. Karanganyar	P GOLKAR	118.395	25,33	
23.	Kab. Sukoharjo (7)	PDIP	172.558	37,60	Menang
24.	Kab. Wonogiri (15)	PDIP	296.081	49,67	Menang
25.	Kota Surakarta (11)	PDIP	103.886	35,65	Menang
KARISEDENAN KEDU					
26.	Kab. Magelang	PKB	182.829	26,64	
27.	Kota Magelang (6)	PDIP	18.367	26,43	Menang
28.	Kab. Temanggung	P GOLKAR	86.000	20,24	
29.	Kab. Purworejo (13)	PDIP	112.271	27,99	Kalah
30.	Kab. Kebumen (2)	PDIP	210.753	35,14	Menang
31.	Kab. Wonosobo (14)	PDIP	120.423	27,98	Kalah
KARISEDENAN BANYUMAS					
32.	Kab. Banyumas	PDIP	316.003	37,04	
33.	Kab. Cilacap	PDIP	299.106	33,54	
34.	Kab. Purbalingga (10)	PDIP	153.413	33,97	Menang
35.	Kab. Banjarnegara (24)	PDIP dan P GOLKAR	115.171	24,02	Menang

Sumber : KPU Jawa Tengah

Banyak analisa yang bisa dipaparkan itu menjawab mengapa hasil Pemilu Legislatif tidak bisa sejalan dengan hasil Pilkada di Kabupaen/Kota Jawa Tengah ? Memang secara teori partai politik yang menjadi Pemenang dalam Pemilu Legislatif tentunya mempunyai keinginan akan mempertahankan dominasinya agar Pilkada langsung juga dimenangkan olehnya. Untuk itu berbagai strategi telah disiapkan dalam pencalonan Kandidat Kepala Daerah (salah satunya misalnya dengan menjalin koalisi) untuk memenangkan Pilkada Langsung. Namun perbedaan sistem pemilihan dan perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada bisa menunjukkan hasil perolehan yang tidak sejalan

Pembahasan

Dalam Pemilu Legislatif, pemilih kecenderungannya akan lebih memilih partai politik sementara karakteristik Pilkada Langsung, pemilih cenderung memilih orang (kandidat) dengan tidak mempertimbangkan dari partai apa calon (kandidat). Kecenderungannya Kandidat yang mempunyai ketokohan lebih dekat dan dikenal masyarakat akan lebih dipilih oleh pemilih dalam Pilkada Langsung (Lihat Prihatmoko Joko; 2008).

Analisis lain menunjukkan bahwa perolehan suara partai politik pemenang dalam Pemilu Legislatif ternyata tidak ada yang mencapai mayoritas. Hal ini sebagai akibat adanya jumlah partai politik peserta pemilu yang terlalu banyak. Kondisi ini tentu saja menyebabkan kesulitan bagi partai politik untuk bisa memobilisasi perolehan suara dalam Pilkada Langsung.

Yang menarik lagi koalisi yang dibangun dalam Pilkada Langsung Kabupaten Kota di Jawa Tengah pada umumnya tidak bersifat permanen. Hampir di semua Kabupaten / Kota koalisi yang dibangun dalam Pilkada bisa berbeda-beda tergantung deal atau lobi-lobi pada tingkat kepentingan politik. Yang menarik lagi, Partai Golkar dengan PDIP yang selama ini berseberangan bisa menjalin koalisi bersama misalnya di Kabupaten Wonogiri, Sragen dan Kendal. Padahal kita tahu bahwa PDIP selalu memposisikan dirinya sebagai partai oposisi terhadap partai Golkar. Fenomena ini bisa jadi karena segala cara dan strategi akan ditempuh karena kemenangan dalam Pilkada dianggap sangat strategis.

Kemenangan Pilkada Langsung pada dasarnya memiliki makna penting bagi Partai Politik. Pertama, kemenangan dalam Pilkada dianggap sebagai kunci untuk memperebutkan kekuasaan eksekutif di masing-masing daerah. Dengan menguasai eksekutif maka partai politik bisa menjalankan visi maupun kebijakan-kebijakan politiknya. Kedua, kemenangan dalam Pilkada dianggap sebagai peluang bagi partai politik dalam proses pembelajaran bagi kader politiknya. Ketiga, kemenangan dalam Pilkada pada dasarnya menjadi tiket untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu Legislatif periode berikutnya. Hanya dengan cara memenangkan Pilkada maka partai politik akan bisa menguasai jaringan serta struktur birokrasi yang pada nantinya bisa dimobilisasi untuk kemenangan dalam Pemilu Legislatif yang akan datang.

Perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada Langsung yang berbeda secara faktual akan bisa menyebabkan 'hambatan' dalam penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hambatan itu terjadi lantaran adanya perbedaan kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif bila keduanya memiliki latar belakang politik yang berbeda.

Seperti diketahui dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai 3 (tiga) kategori tugas dan fungsi yaitu : Pertama, Bidang Legislasi, Kedua, Bidang Anggaran, dan bidang pengawasan. Pada Bidang legislasi, anggota DPRD mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat, membahas dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda). Pada bidang anggaran DPRD mempunyai tugas dan kedudukan untuk memberikan persetujuan APBD yang telah disusun Eksekutif. Sementara pada bidang pengawasan, anggota DPRD pada dasarnya dibekali dengan hak bertanya, hak menyatakan pendapat, hak interpellasi dan hak angket untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap

pemerintah (Eksekutif) (Lihat Reni Dwi Purnomowati : 2005)

Dari tugas dan kedudukan tersebut semuanya dilaksanakan dalam sistem demokrasi . Dalam sistem tersebut, keputusan tentunya akan ditentukan oleh persetujuan seluruh anggota DPRD. Namun bila persetujuan tidak bisa terlaksana maka bisa dimungkinkan dengan mekanisme pemungutan suara (*Voting*).

Dengan komposisi kekuatan partai Pemenang Pemilu Legislatif atau perolehan kursi di DPRD yang tidak menguasai mayoritas tentunya akan mempengaruhi tingkat persetujuan anggota Dewan. Bisa dipastikan persetujuan akan sulit dicapai apabila kekuatan Partai Pemenang Pemilu Legislatif tidak ada yang dominan. Hal inilah yang yang dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya kemacetan dalam penyusunan kebijakan (Lihat Rozali Abdullah ; 2005)

Kondisi di atas akan semakin bertambah parah apabila pemerintahan (Eksekutif) yang terbentuk dari hasil Pilkada Langsung tidak seiring dan sejalan dengan hasil perolehan suara atau kekuatan kursi di Dewan atau bisa dibuat dalam Istilah "*Divided Government*". Dalam *Divided Government*, kekuasaan pemerintahan eksekutif (Kepala Daerah) dikuasai oleh Satu Partai sementara kekuasaan Legislatif (DPRD) dikuasai oleh Partai Lain. Secara teoritis, pemerintahan dengan pola *divided Government* (pemerintahan yang Terbelah) akan lebih banyak menimbulkan potensi konflik antara Eksekutif dan Legislatif baik dalam bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi efektifitas pemerintahan di daerah.

Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari hasil Pilkada Kabupaten / kota di Jawa Tengah selama periode 2005 - 2006 menunjukkan bahwa dari 26 Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan Pilkada Langsung menunjukkan 50% daerah ditandai dengan pemerintahan yang terbelah (*Divided Government*). Ini menunjukkan bahwa Kepala Daerah Terpilih bukan diusung oleh Partai Pemenang Pemilu Legislatif atau mayoritas kursi di DPRD. Sementara 50% daerah ditandai pemerintahan yang tidak terbelah (*unified government*), dimana Kepala Daerah terpilih diusung oleh Partai Pemenang Pemilu Legislatif (mayoritas kursi di DPRD).

Hasil perolehan tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa dalam Pemerintahan yang terbelah (*Divided Government*) antara Kepala Daerah dengan DPRD memiliki kecenderngan adanya konflik. Dalam pemerintahan yang *Divided* bisa kemungkinan tidak terjadi adanya konflik seperti Di Kabupaten Blora dimana Kepala Daerah bukan berasal dari Partai mayoritas DPRD namun tidak terjadi konflik selama pemerintahan berjalan.

Demikian pula dalam Pemerintahan yang tidak terbelah (*unified Government*) belum tentu pemerintahan bisa berjalan mulus tanpa adanya konflik. Pengalaman Kabupaten Kebumen menunjukkan fenomena yang berbeda ketika dalam pemerintahannya justru muncul konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD meski mereka sama-sama berasal dari salah satu partai politik.

Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu kajian mendalam dengan mengambil beberapa saja Kabupaten Kota yang mengalami konflik atau tidak terjadi konflik antara Eksekutif dan Legislatif pasca pemerintahan *Divided* ini . Hal ini untuk mengetahui secara langsung dinamika hubungan politik antara Kepala Daerah dengan Legislatif pasca dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pilkada Langsung secara langsung yang mengalami *Divided Government* maupun yang mengalami *Unified Government*.

Daftar Rujukan

- Lijphart, Arend; Ibrahim R (Penyadur), (1995) *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*; Raja Grafindo Persada; Jakarta;
- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purnomowati, Reni Dwi. (2005). *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- A Rahman HI. (2007). *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moleong, Lexy J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. (1989), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES